

**PPENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN  
MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Putusan Nomor 1363/ Pid.Sus/ PN-JKT. SEL)**

**Rahmi Suciani<sup>1)</sup>, Syafridatati<sup>1)</sup>**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**  
E-mail: [Rahmisuci98@gmail.com](mailto:Rahmisuci98@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*The Crime of Distributing Electronic Documents with contents violates decency. Decision Number 1363 / Pid.Sus / 2017 / PN.JKT.SEL, Defendant Yulianto Bin Suwoto was proven to have committed a criminal act of distributing electronic documents that had charges of violating decency. Formulation of the Problem: (1) How is the application of crime to the perpetrator of a criminal act of distributing electronic documents that have the content of violating decree number 1363 / Pid.Sus / 2017 / PN. JKT. SEL? (2) What is the judge's consideration in deciding the case of the criminal offender in distributing electronic documents that have the content of violating decree number 1363 / Pid.Sus / 2017 / PN. JKT. SEL? This study uses a normative juridical approach. The data source used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used document study and the data were analyzed qualitatively. From the results of the research it can be concluded that: (1) The form of criminal application against perpetrators of criminal acts distributes electronic documents that have the content of violating decency in Article 27 Paragraph (1) in conjunction with Article 52 Paragraph (1) of the ITE Law and Article 4 Paragraph (1) in conjunction with 29 The Pornography Law in Decision Number 1363 / Pid.Sus / 2017 / PN.JKT.SEL, the defendant was sentenced to two years imprisonment and a fine of Rp. 1,000,000,000 on the condition that if the fine was not paid, it was replaced by three months imprisonment. (2) judge using two kinds of considerations, namely juridical and non-juridical considerations*

**Keyword: Applicattion, Electronic Documents, Distributting, Decency**

---

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Sebagaimana terdapat dalam perkara nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL.

Berikut kronologis kasus Perkara Pidana Nomor : 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL Yulianto Bin Suwoto mengaku bahwa tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan / nafsunya semata, dan ketika ditawarkan setelah melihat peluang besar dalam mendistribusikan atau memperjual belikan video pornografi anak yang melakukan hubungan sesama jenis (Gay) , Yulianto mencoba untuk melakukan tindakan tersebut dengan cara

membuat akun twitter yang mana akun tersebut berisikan video-vidio pornografi yang memperlihatkan anak yang sedang melakukan hubungan sex sesama jenis (gay).

Terdakwa Yulianto mengaku sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) dan sudah mendaptkan pembeli video tersebut lebih kurang 150 orang yang sudah melakukan transaksi dengannya.

Akibat perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar satu Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 3 (tiga) bulan.

Beranjak dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik membuat artikel yang berjudul

**“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Putusan Nomor 1363/ Pid.Sus/ PN-JKT. SEL)”.**

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL?

**METODE PENELITIAN**

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulis akan menganalisa putusan dengan nomor perkara 1363/ Pid.Sus/ 2017/PN-JKT-SEL.

b. Sumber Data

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
  - c) Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL
  - d) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan misalnya kamus hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau dokumen.

d. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan Pidana dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 1363/ Pid.Sus/ 2017/ PN-JKT-SEL)**

Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor 1363/ Pid.Sus/2017/PN-JKT-SEL Berikut kronologis kasus Perkara Pidana Nomor : 1363/Pid.Sus/2017/PN.JKT.SEL Yulianto Bin Suwoto mengaku bahwa tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan / nafsunya semata, dan ketika ditawarkan setelah melihat peluang besar dalam mendistribusikan atau memperjual belikan video pornografi anak yang melakukan hubungan sesama jenis (Gay) , Yulianto mencoba untuk melakukan tindakan tersebut dengan cara membuat akun twitter yang mana akun tersebut berisikan video-vidio pornografi yang memperlihatkan anak yang sedang melakukan hubungan sex sesama jenis (gay).

Terdakwa Yulianto mengaku sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 6.000.000.- (Enam juta rupiah) dan sudah

mendapatkan pembeli video tersebut lebih kurang 150 orang yang sudah melakukan transaksi dengannya.

Akibat perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar satu Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 3 (tiga) bulan.

Dalam menjatuhkan/ mengadili pelaku tindak pidana hakim melakukan dua cara dalam melakukan pertimbangan yakni :

Secara Yuridis pertimbangan hakim diantaranya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Fakta-Fakta, Alat Bukti dan Barang Bukti. **(Rusli,2006:124).**

Sedangkan secara non yuridis hakim melihat latar belakang melakukan tindak pidana mendistribusikan media elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dan akibat dari perbuatannya video pornografi anak yang melakukan hubungan seksual sesama jenis gampang diakses oleh masyarakat. Adapun kondisi terdakwa sudah cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatannya dapat merusak moral dan generasi muda bangsa, sedangkan hal-hal yang meringankan yakni: terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa masi muda dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan pidana dalam putusan nomor 1363/ Pid.Sus/2017/PN-JKT-SEL Pasal Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan juga diancam dengan Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang diputus oleh Hakim dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00- ( satu milyar rupiah) , dengan ketentuan jika denda tersebut

tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Pentingnya sosialisasi dan penjagaan dalam menggunakan media sosial agar tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan tidak terulang lagi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.